

Abstract

This paper aims to investigate pesantren respons to socio-cultural change as result of modernity. The pesantren, a part of social subculture as traditional instituition, does not escape it. Its existence will be always challenged by alteration as a necessity that change moral value experience. There are two problems investigated in this paper. Firstly, political polices government's was pressure for pesantren in following them determined by development plan. Secondly, involvement of pesantren as traditional institution in developing rural community.

*Consequently, pesantren needed to carry out an internal renewal as impact of modernization. It demanded to not only be agent of Islamic doctrine development (*tafaquh fiddin*) but also be an actual player in social and cultural construction. At last, there were four reformations conducted by pesantren, that is, reformation of pesantren education, methodology, instutution, and social-economic function.*

Keywords: Pesantren, Perubahan sosial politik, respon

Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosio-Politik di Indonesia (1970-2000)

Ahmad Ali Riyadi

Proses perubahan sosio-kultural yang berlangsung dalam iklim pembangunan di Indonesia telah menjamah setiap sudut kehidupan. Pesantren, sebagai salah satu subkultur sosial yang seringkali disebut orang sebagai lembaga tradisional yang ada di Indonesia, tidak luput dari jangkauan proses tersebut. Eksistensinya akan selalu ditantang oleh perubahan sebagai sebuah kebutuhan yang mengalami pergeseran nilai. Kemampuan pesantren memenuhi tuntutan kebutuhan pendukungnya menjadi batu ujian bagi kelangsungan eksistensinya sehingga transformasi sosio-kultural yang ditempuhnya harus senantiasa memperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.

Pada prinsipnya, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia tertua, merupakan pusat kegiatan keagamaan murni (*tafaqquh fiddin*) untuk penyiaran agama Islam. Itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya. Identitas lain yang sering melekat pada pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan Islam ortodoks secara konservatif. Kini, sebutan-sebutan yang mengesankan jauh dari modernitas tidak lagi memadai, walaupun pesantren tetap mempertahankan ciri khas sebagai lembaga pendidikan agama, sesuai dengan kemajuan zamannya. Pesantren tetap eksis dan mampu melakukan evolusi mengikuti perkembangan dan perubahan. Boleh dikata, pesantren telah mampu mengalami inovasi-inovasi secara interen maupun eksternal untuk merespon perubahan.

Tulisan berikut mencoba memotret respon pesantren terhadap kekuatan-kekuatan eksternal. Ada dua persoalan yang disoroti tulisan ini. Pertama, menyangkut kebijakan politik pemerintah yang telah memaksa pesantren untuk mengikuti pola-pola kebijakan yang telah ditentukan demi pembangunan. Pada sisi yang lainnya, menyangkut keterlibatan pesantren sebagai suatu lembaga “tradisional”

untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat.

Pesantren dalam Bingkai Politik

Gesekan politik dan pesantren sudah terjadi pada masa kolonial. Lembaga ini berperan menentang penetrasi kolonialisme yang pada akhirnya melakukan strategi uzlah atau menutup dan menghindar dari persoalan-persoalan politik. Peran seperti ini berlanjut sampai pada masa kemerdekaan. Sebagai dampaknya pesantren menjadi terisolir dari persoalan-persoalan politik dan kurang diperhitungkan eksistensinya secara nasional.

Selanjutnya, terjadi perubahan orientasi politik di dunia pesantren, ketika intervensi politik menjangkau segenap jalur kehidupan sosial masyarakat, dengan adanya rekayasa penataan politik yang dikembangkan penguasa yang mempunyai dampak politis yang tidak dapat dihindari oleh lembaga pendidikan pesantren. Secara hegemonik, negara menguasai lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam rangka menarik massa agar berada dalam spektrum kebijakan dan kekuasaan pemerintah. Dari sinilah pesantren yang semula independen dari atmosfir politik menjadi termobilisasi demi kepentingan penguasa. Mobilisasi di sini dipahami sebagai pengakomodasian kepentingan pesantren demi mendukung sepenuhnya rekayasa pembangunan pemerintah.

Dalam konteks pembahasan ini, ada beberapa persoalan penting yang perlu diperhatikan untuk memahami keterlibatan pesantren dalam atmosfir politik. *Pertama*, pelembagaan ulama lewat pesantren. *Kedua*, kedudukan lembaga pesantren di tengah masyarakat. Persoalan yang pertama mengarah kepada kedudukan ulama dalam pesantren sebagai basis institusi ulama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam bangunan pesantren ulama merupakan otoritas tunggal dan monopoli penafsiran keagamaan sekaligus sebagai penjelmaan dari paham keagamaan itu sendiri.¹ Ulama dianggap sebagai penyalur kemurahan Tuhan kepada santri-santrinya. Di samping itu, posisi ulama dilihat sebagai puncak karir seorang santri dan pesantren menjadi sarana proses mobilisasi sosial. Pada faktor kedua, didukung kenyataan bahwa kedudukan ulama selalu mendapat tempat terhormat di tengah masyarakat sekitar pesantren. Ulama mempunyai otoritas yang tinggi di tengah tempat tinggalnya. Sikap hidup yang dibangun ulama di pesantren mempengaruhi pola kehidupan sosial keagamaan masyarakat sekitar pesantren berada.² Dalam kerangka inilah ulama menjadi agen proses intensifikasi keislaman masyarakat.

Secara historis, pesantren selalu dikaitkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU).³ Hal ini didasarkan pada kenyataan pesantren selalu berafiliasi pada organisasi ini, meskipun ada juga pesantren yang tidak berafiliasi pada lembaga tersebut, bahkan netral terhadap ormas keagamaan dan kekuatan sosial politik

¹ Jajat Burhanuddin, "Ulama dan Politik Pembentukan Umat: Sekilas Pengalaman Sejarah Indonesia," dalam Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedlowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia* (Jakarta; Gramedia, 2003), hal. 22.

² Tentang hal ini lihat Dawam Rahardjo, "Kyai dalam Perubahan Sosial," dalam *Pesantren*, No. 4/ Vol. II/1985, hal. 20-29.

³ Sudirman Tebba, "Dilema Pesantren: Belenggu Politik dan Pembaruan Sosial," dalam Dawam Rahardjo (edt.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah* (Jakarta; P3M, 1985), hal. 277.

tertentu. Dari 11.312 pondok pesantren (ponpes) yang ada, 7.306 (64,59%) berafiliasi ke NU, 184 (1,63%) ponpes berafiliasi ke Muhammadiyah, 49 (0,43%) ponpes berafiliasi ke Persis, 118 (1,04%) ponpes berafiliasi ke Al-Washliyah, 46 (0,41%) ponpes berafiliasi ke Persatuan Umat Islam (PUI), 33 (0,29%) ponpes berafiliasi ke Mathla'ul Anwar, 50 (0,44%) ponpes berafiliasi ke al-Khairat, 97 (0,86%) ponpes berafiliasi ke Nahdlatul Wathan, 51 (0,45%) ponpes berafiliasi ke Darud Dakwah wal Irshad, 137 (1,21%) ponpes berafiliasi ke Perti, 43 (0,38%) ponpes berafiliasi ke GUPPI, 10 (0,09%) ponpes berafiliasi ke LDII, dan sebanyak 572 (5,06%) ponpes berafiliasi ke ormas lainnya. Sebanyak 2.616 (23,13%) ponpes menyatakan mandiri.⁴ Data tersebut menunjukkan banyaknya pesantren yang berafiliasi pada NU, sehingga dapat dikatakan untuk mengkaji peran politik pesantren dengan politik sangat berhubungan dengan dinamika perpolitikan NU *vis a vis* pemerintah.

Hubungan politik dengan pesantren dapat dicermati mulai masa awal kemerdekaan (Orde Lama) dan berlanjut masa Orde Baru. Perseteruan sengit terjadi di tahun 70-an. Ketika pemilihan umum pertama kali diadakan pada masa Orde Baru di tahun 1971, afiliasi politik elit pesantren (kyai) dapat diidentifikasi. Hal ini dapat dilihat dari besarnya dukungan para kyai dan pesantren pada Partai NU, di samping dukungan para kyai dan pesantrennya pada partai-partai Islam yang lain seperti PARMUSI dan PSII. Tampaknya dukungan yang diberikan para petinggi NU pada waktu itu masih sebatas pada partai yang bergariskan Islam.⁵

Fenomena itu berubah di tahun 1973 pada saat Orde Baru melakukan penyederhanaan partai-partai melalui kebijakan fusi, yang memasukkan partai-partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Afiliasi politik kyai mulai pudar tidak hanya pada PPP saja, akan tetapi banyak kyai yang mendukung partai selain partai PPP, yakni Golkar dan PDI. Beberapa kyai kedapatan secara terbuka mendukung Golkar misalkan, di Jawa Timur, KH. Musta'in Romly (PP Darul Ulum Jombang), KH. Karim Hasyim (putra Kyai Hasjim Asy'ari dari PP Tebuireng Jombang), KH. Badrus Saleh dari Kediri, Kyai Zaini dari Probolinggo, dan sebagainya. Bahkan, ada beberapa kyai setelah pesantrennya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah kemudian mendukung Golkar, seperti PP al-Kamal Blitar, PP Sabilul Muttaqin Takeran, dan PP Nahdlatul Wathon Lombok Timur.⁶

Begitu juga di tahun 1985 ketika Orde Baru menerapkan asas tunggal Pancasila bagi segenap Ormas dan Orsospol dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1985 tentang Asas Tunggal dan Partai Politik. Hal ini menambah pudarnya afiliasi kyai dan pesantren pada PPP saja, yang dianggap sebagai partai berdasar Islam. Pada Pemilu 1992, banyak pondok pesantren yang memberikan dukungan kepada PPP, ada yang bergabung dalam Golkar, ada yang bergabung ke PDI, ada pondok pesantren yang netral dalam artian tidak mendukung ketiga partai yang ada, bahkan golput (golongan putih). Kyai yang mendukung PPP adalah Kyai Syamsuri Badawi dari PP. Tebuireng Jombang, KH. Maksum dari PP. Lirboyo Kediri, KH. Nizar

⁴ Depag RI, *Pondok Pesantren* Jakarta; Depag, 2001), hal. 28.

⁵ Muhammad Asfar, "Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai," dalam *Prisma* 5, Mei 1995, hal. 31

⁶ *Ibid.* hal. 32.

Nawawi dari PP Raudlatul Muta'allimin Pasuruan, KH. Zaki Gufron Wakil Ketua NU Jatim, KH. Hasib Wahab PP Bahrul Ulum, KH. Arifin PP Denanyar Jombang, KH. Ilyar Ruchiyat PP. Cipasung Jabar, KH. Nadzir Muhammad dari PP. Asyidiqiyah Jember. Sementara yang ikut bergabung dalam Golkar diantaranya KH. Muhammad As'ad Umar dan KH. Rifai Romli dari PP Tebuireng Jombang dan KH. Seichul Hadi Purnomo. Diantara yang netral adalah KH. Yusuf Hasjim dari PP Tebuireng Jombang, KH. Shoib Bisri dari Mamba'ul Ma'arif Jombang, KH. Ali Wafa, KH. Husnan Mutawakil Ridwan. Diantara pendukung PDI adalah KH. Khatib dari Jember dan Tengku Syeh Haji Rajali dari Aceh. Diantara yang golput adalah KH. Darul Alfiah dari PP. Gentur Cianjur.⁷

Afiliasi politik kyai terhadap partai-partai tersebut bukannya tanpa gesekan, karena adanya perbedaan dalam menyikapi kebijakan politik. Gesekan ini bermula dari sikap NU ketika menolak fusi ke dalam PPP tahun 1973, begitu juga sikap keras menolak yang ditunjukkan sebagian wakil NU di DPR ketika pemerintah mengajukan RUU Perkawinan tahun 1973 dan *walk out* yang dilakukan unsur NU dalam Sidang Umum MPR 1978, mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap NU. Sikap tegas pemerintah ditunjukkan dengan penyingkiran tokoh-tokoh NU di Departemen Agama dengan menempatkan Mukti Ali sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan II (1973-1978), juga menempatkan pejabat-pejabat untuk menduduki posisi kunci di Departemen Agama semisal M. Kafrawi, Muljanto Sumardi dan Bahrun Rangkuti.⁸ Begitu juga banyak dari tokoh-tokoh NU yang mempunyai suara sumbang tidak diperbolehkan lagi menjadi anggota dewan setelah Pemilu 1982.⁹ Perdebatan seputar penerapan asas tunggal di kalangan NU, keluarnya NU dari Partai Persatuan Pembangunan dan pengunduran diri dari politik praktis juga menambah dinamika perjalanan politik NU yang diwakili kalangan elit pesantren.¹⁰

Langkah perpolitikan NU terhadap sikap represif pemerintah Orde Baru tersebut lebih mengarah kepada hubungan yang bersifat antagonistik. Antara keduanya selalu terjadi kecurigaan yang berlebihan. Pemerintah secara konsisten melaksanakan gagasan pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik dan penyederhanaan partai-partai dalam rangka menciptakan stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini justru menimbulkan kecurigaan di

⁷ *Tempo*, 21 September 1991 dan 30 Mei 1992; *Surabaya Post*, 20-29 Mei 1992. Sebagaimana dikutip Muhammad Asfar, *Op. Cit.*, hal. 32.

⁸ Mereka yang menduduki posisi penting adalah para kader terbaik Muhammadiyah. Nampaknya, apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk memanfaatkan perpecahan dan perseteruan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan cara mengadu domba diantara keduanya. Pada sisi yang lain, peristiwa tersebut adalah suatu keberhasilan Muhammadiyah dalam meraih kepercayaan di mata pemerintah Orde Baru.

⁹ Sudirman Tebba, *Op. Cit.*, hal. 286.

¹⁰ Keterangan lebih jelas tentang persoalan tersebut lihat Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, penerj. Lesmana (Yogyakarta; LKIS, 1999), 187-271.

kalangan agamawan (NU) bahwa pembangunan politik pemerintah Orde Baru lebih mengarah pada sekularisasi dengan membabat habis semua ciri khas keagamaan yang mengarah kepada kekuatan-kekuatan sosial politik.

Babak baru langkah politik NU terjadi ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memegang pucuk pimpinan. NU yang dimotori Gus Dur melakukan manuver politik dengan sikap yang lebih akomodatif terhadap politik pemerintah Orde Baru, yakni menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar organisasi. Peristiwa ini ditunjukkan dengan pernyataan politik NU dalam muktamarnya ke 27 di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, sekaligus statemen politik kembali ke Khitthah 1926 yang berarti meninggalkan politik praktis, termasuk bersikap ganda terhadap PPP sebagai induk perpolitikan yang berbasis keagamaan.¹¹

Langkah politik NU tersebut membawa dampak lebih lanjut pada perkembangan pesantren, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal, keputusan tersebut membawa dampak pada legitimasi politik bagi pesantren dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi dengan menggalang kerjasama yang lebih luas terhadap lembaga-lembaga yang didirikan pemerintah, yang berdampak pada usaha pemerintah membantu pesantren berupa dana dan guru melalui Departemen Agama. Begitu pula dengan tidak keluar dari PPP secara vertikal memberi kemungkinan bagi pesantren untuk tetap menjadi penyedia person politik untuk PPP dan kekuatan sosial politik di luarnya.¹²

Secara politis pedagogis, munculnya bantuan finansial yang diberikan pemerintah kepada pesantren menimbulkan persoalan secara politis maupun ekonomis terhadap pesantren. Secara politis berhubungan dengan kebijakan pembangunan politik Orde Baru yang bersifat represif terhadap pendidikan yang berciri khas keagamaan dari kehidupan politik. Hal ini membawa dampak pada ketidakmampuan pesantren ikut mewarnai kebijakan politik pendidikan yang digagas Orde Baru. begitu juga pendidikan yang berkembang di pesantren terjebak pada paradigma nasionalisasi, strukturisasi, formalisasi dan depolitisasi pendidikan, yang mengarah kepada pemunggiran lembaga pendidikan pesantren. Pada sisi yang lain, dari segi ekonomi, menimbulkan sikap ketergantungan pesantren terhadap subsidi yang diberikan pemerintah. Posisi tergantung pesantren ini tidak mustahil dimanfaatkan oleh pemerintah lewat partai politik. Secara kasuistik di tahun 1985 partai Golongan Karya (Golkar) partai dukungan pemerintah menjadikan pesantren tempat pembinaan kader-kadernya.¹³ Namun demikian, adaptasi yang dilakukan pesantren terhadap kebijakan pemerintah tidak jarang membawa dampak positif bagi posisi tawar agar orang-orang pesantren memperoleh posisi penting dalam lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif di pemerintahan.

Fenomena politik tersebut tidak hanya berdampak pada eksistensi pesantren yang perlu diperhitungkan dalam atmosfir politik, tetapi juga berdampak pada sikap pesantren dalam mengantisipasi sistem pendidikan yang dianut pemerintah. Interaksi pesantren dengan pendidikan bermula dari rekayasa politik pemerintah

¹¹ A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia* (Yogyakarta; LKiS, 1995), hal. 136.

¹² Sudirman Tebba, *Op. Cit.*, hal. 280.

¹³ *Ibid.* hal. 286.

untuk menata sistem pendidikannya dengan langkah modernisasi pendidikan mengikuti pola pendidikan modern Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.¹⁴ Pada masa ini pesantren mengalami tantangan yang berat disebabkan ekspansi sistem pendidikan modern yang diikuti pemerintah. Bahkan, ditinjau dari segi politik pendidikan, pesantren dalam konteks sistem pendidikan nasional tidak mendapatkan pengakuan secara formal. Hal ini dapat dicermati dari kebijakan pemerintah yang memasukkan pesantren dalam pendidikan jalur luar sekolah sesuai dengan PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Secara eksplisit dalam bab III pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan.¹⁵ Pondok pesantren termasuk dalam pendidikan yang bercorak keagamaan dan membawa konsekuensi pada *out-put* pondok pesantren tidak diakui keberadaannya secara formal.

Pemerintah menganggap proses belajar mengajar di pondok pesantren tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan karena sistem pendidikan pondok pesantren lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan menggunakan manajemen yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah.¹⁶ Tampaknya pemerintah menerapkan standar ganda. Satu sisi pesantren dianggap pemerintah sebagai lembaga yang harus dibina dan dikembangkan karena mempunyai peran yang cukup strategis untuk ikut memobilisasi masyarakat guna mendukung stabilnya pembangunan ekonomi, namun di sisi lain keberadaan pondok pesantren ditempatkan jauh dari sistem pendidikan nasional. Karena bagaimanapun juga sistem pendidikan pondok pesantren dianggap tidak mempunyai standar yang baku.

Fenomena tersebut sangat menyulitkan kedudukan pesantren dalam percaturan sistem pendidikan Orde Baru, sehingga dalam konteks perkembangan sejarahan, pesantren merespon kebijakan Orde Baru sesuai dengan dinamikanya, dalam artian ada pesantren yang merespon secara akomodatif dan ada juga pesantren yang merespon secara defensif. Ada pesantren yang meresponnya dengan merevisi kurikulumnya dan memasukkan semakin banyak mata pelajaran umum dan membuka kelembagaan serta fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kependidikan umum. Pada sisi yang lain, ada pesantren yang tetap melakukan peran bertahan dengan mempertahankan substansi pendidikan tradisional.

Pada persoalan pertama pesantren merespon kebijakan pendidikan Orde Baru dengan melakukan evolusi pendidikan dengan membuka lembaga pendidikan modern (umum), merupakan dinamika tersendiri setelah merasa tersaingi dengan sistem kelembagaan madrasah sebagai lembaga modern yang dikembangkan pemerintah. Untuk merespon perkembangan tersebut semakin banyak pesantren yang

¹⁴ Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan," dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta; Paramadina, 1997), hal. xii.

¹⁵ Lebih lengkapnya lihat "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah", dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)*, (Depag RI; Ditjen Binbaga Islam, 1998), hal. 442

¹⁶ Hal itu sebagai akibat pemerintah menganut sistem pendidikan Belanda yang dinilai lebih modern dan mempunyai sistem yang standar. Tentunya hal ini membawa dampak pada kemarjinalan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

mendirikan pendidikan modern di dalam kompleks pesantren masing-masing. Dengan cara ini pesantren tetap berfungsi sebagai pesantren dalam pengertian aslinya, yaitu tempat pendidikan dan pengajaran bagi santri yang ingin memperoleh pengetahuan Islam secara mendalam dan sekaligus madrasah bagi anak-anak di lingkungan pesantren. Sebagian murid-murid madrasah ini sekaligus menjadi santri tetap di pesantren yang bersangkutan.¹⁷ Dengan mendaftar sebagai santri murid madrasah mereka kemudian mendapatkan pengakuan dari Departemen Agama dan memiliki akses lebih besar tidak hanya dalam melanjutkan pendidikan, akan tetapi juga dalam lapangan kerja. Dalam perkembangan selanjutnya tidak jarang ditemukan pesantren memiliki lebih banyak murid madrasah dari pada santri yang hanya belajar ngaji khusus di pesantren.¹⁸

Beberapa pesantren tidak hanya mengembangkan eksperimennya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan bersistem madrasa. Beberapa pesantren bahkan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada di bawah sistem Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bukan yang lazim mengikuti pembinaan di bawah Departemen Agama. Dengan pengertian, pesantren bukan hanya mendirikan madrasah tetapi juga sekolah-sekolah umum yang mengikuti sistem dan kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁹ Ada juga sebagian madrasah di pesantren yang tidak bersedia mengikuti dan menyesuaikan kurikulumnya dengan

¹⁷ Berikut data yang menunjukkan santri tetap yang belajar di sekolah formal di dalam pondok pesantren; 26.548 (1,84%) belajar di RA, 7,18% di MI, 192.200 (13,49%) di MTs, 86.026 (5,95%) belajar di MA, 9.868 (0,68%) belajar di MAK, 2.498 (0,17%) belajar di MA Keterampilan, dan 5.929 (0,41%) belajar di PTAI. Semua data tersebut berada di bawah koordinasi Departemen Agama yang dikelola ponpes. Sedang lembaga pendidikan yang dikelola ponpes yang berada dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah ada 2.167 (0,15%) santri menempuh pendidikan TK, 5.244 (0,36%) menempuh pendidikan SD, 20.415 (1,41%) menempuh SMP, 4.725 (0,33%) di SMPT, 14.500 (1,00%) di SMU, 3.694 (0,26%) di SMK dan 1.636 (0,11%) di PTU. Depag, *Op. Cit.*, hal. 29

¹⁸ Sedangkan data santri tetap yang belajar di lembaga pendidikan yang ada di luar pondok pesantren; 14. 362 (0,99%) belajar di RA, 56.061 (3,88%) belajar di MI, 63.332 (4,38%) belajar di MTs, 2.794 (0,19%) di MTsT, 31.933 (2,21%) di MA, 3.460 (0,24%) di MAK, 535 (0,04%) belajar di MA dan 4.638 (0,32%) di PTAI. Sedangkan santri yang belajar di lembaga umum sebagai berikut; 2.275 (0,16%) di TK, 14.524 (1,00%) di SD, 15.171 (1,05%) di SMP, 3.985 (0,28%) di SMPT, 10.227 (0,71%) di SMU, 4.007 (0,28%) di SMK dan 1.665 (0,12%) yang belajar di PTU. *Ibid.*, hal. 31.

¹⁹ Beberapa pesantren banyak yang menyelenggarakan jenjang pendidikan umum. Dari 11.312 pesantren, 165 (1,46%) ponpes menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, 144 (1,27%) ponpes mendirikan Sekolah Dasar/SD, 301 (2,66%) ponpes mendirikan Sekolah Menengah Atas/SMP, 118 (1,04%) ponpes mendirikan Sekolah Menengah Terbuka/SMPT, 216 (1,91%) ponpes mendirikan Sekolah Menengah Umum/SMU, 85 (0,75% ponpes mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan/SMK, 21 (0,19%) ponpes mendirikan perguruan umum. Sedangkan ada juga ponpes yang mendirikan lembaga pendidikan yang berciri khas Islam. Data naratif menunjukkan sebanyak 95 (0,84%) pesantren menyelenggarakan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), 23 (0,20%) mengembangkan Madrasah Aliyah Ketrampilan, 135 (1,19%) pesantren mengadakan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), 1.305 (11,54%) Madrasah Aliyah, 93 (0,82%) pesantren memiliki Madrasah Tsanawiyah Terbuka (MTsT), 2.256 (19,94%) pesantren membuka Madrasah Tsanawiyah (Mts), 1.904 (16.83%) pesantren membuka Madrasah Ibtidaiyah. Hampir data ini, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang diselenggarakan pesantren berstatus swasta. *Ibid.*, hal. 29.

pola kurikulum pemerintah, tapi membuat kurikulum sendiri sesuai dengan idealisme pesantren yang bersangkutan. Hal itu dilakukan untuk merespon kebutuhan umat, khususnya berkenaan dengan kebutuhan masa depan santri untuk bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi.

Deskripsi di atas menunjukkan bagaimana respon pesantren dalam menghadapi berbagai perubahan di sekitar lingkungannya. Dalam menghadapi semua perubahan dan tantangan itu para eksponen pesantren tidak begitu saja melepaskan dan memfokuskan kelembagaan pesantren menjadi lembaga pendidikan modern Islam sepenuhnya, akan tetapi sebaliknya mereka cenderung mempertahankan kebijakan lembaganya secara hati-hati. Mereka menerima pembaharuan pendidikan hanya dalam skala yang terbatas mampu menjamin pesantren tetap eksis.

Pesantren dan Peran Perubahan Sosial

Pesantren juga mengalami eksperimen dalam menghadapi pemeritahan yang menekankan pada pembangunan ekonomi di masa Orde Baru. Sudah tentu hal ini tidak terjadi pada masa orde sebelumnya yang lebih menekankan pada pembangunan di bidang politik.²⁰ Dengan jargon pembangunan ekonomi, pesantren menjadi ajang propaganda sosialisasi demi tercapainya pembangunan. Bertitik tekan pada pertumbuhan ekonomi pemerintah Orde Baru menaruh harapan kepada pesantren untuk menjadi salah satu agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Sesuai dengan ideologi developmentalisme pemerintah Orde Baru, pembaruan pesantren dalam masa ini lebih diarahkan pada fungsionalisasi pesantren sebagai salah satu pusat penting bagi pembangunan masyarakat. Dengan posisi dan kedudukannya yang khas pesantren diharapkan menjadi alternatif kampanye pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

Pemikiran tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat merasakan manfaat pondok pesantren. Lebih dari itu, pondok pesantren sudah merupakan lembaga yang hampir tidak dapat digantikan fungsinya dengan badan lain. Kyai sebagai top figur pesantren telah melekat pada masyarakat di mana pesantren itu berada. Kyai tidak hanya dipandang sebagai konsultan agama akan tetapi menjadi konselor dan poros hubungan antara umat dengan Tuhan.²¹ Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat masih mempercayakan masalah-masalah hidupnya kepada pesantren. Tidak jarang ulama (kyai) dijadikan jastifikasi untuk memperlakukan sesuatu kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat walaupun kadangkala kemaslahatan umat yang dikandungnya masih perlu dipertanyakan keabsahaannya.²²

Transformasi pesantren ke arah modernitas untuk menyongsong pengaruh dari luar berupa pembangunan ekonomi yang digagas Orde Baru, sepenuhnya tergantung pada kyai sebagai figur pemimpin. Ada pesantren yang tetap mempertahankan misi pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fidzin*, akan tetapi ada

²⁰ Tentang orientasi perbedaan visi pembangunan dua orde, selanjutnya lihat Mochtar Mas'ud, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966–1971* (Jakarta; LP3ES, 1989).

²¹ Hiroko Horikoshi, *Kyai Dan Perubahan Sosial* (Jakarta; P3M, 1987), hal. 232.

²² Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri* (Yogyakarta; LPSM NU DIY, 1995), hal. 140.

juga pesantren yang didesain sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial ekonomi keagamaan di samping pengkajian kitab-kitab klasik sebagai ciri khas pesantren. Pada pesantren tipe terakhir ini agenda ekonomi merupakan bagian dari misi pesantren. Istilah pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fiddin* (ilmu-ilmu agama) telah mengalami pengembangan makna yaitu lembaga yang mendidik santri agar di samping menguasai ilmu-ilmu agama, juga memahami realitas masyarakat. Maka, para santri di samping mempelajari ilmu-ilmu agama juga diberi kesempatan untuk memperoleh keterampilan, baik melalui aktivitas-aktivitas lembaga ekonomi yang ada di pesantren maupun melalui pelatihan-pelatihan keterampilan.²³

Dari sinilah muncul ada gagasan memasukkan program pemerintah Orde Baru untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan cara memberi bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pesantren. Pada akhirnya banyak pesantren yang mendirikan lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga pengembangan swadaya masyarakat sebagai proses transformasi sosio kulturalnya.

Persoalan lain secara geografis mayoritas pesantren tumbuh dan berkembang di lingkungan pedesaan, yang notabene masyarakat rata-rata berada dalam strata menengah ke bawah. Data naratif menunjukkan sekitar 1.325 (11,71%) pesantren berada di perkotaan, 8.829 (78,05%) berada di pedesaan, dan sekitar 1.158 (10,24%) berada di daerah urban, daerah perbatasan antara kota dan desa. Di samping itu, sebanyak 1.546 (13,67%) berada di dekat pegunungan, 311 (2,75%) di lokasi pantai, 432 (3,82% di dekat sungai, 2.429 (21,47%) di daerah pertanian, 49 (0,43%) di sekitar hutan, 93 (0,82%) di lokasi transmigrasi, 6.089 (53,83%) berada di lokasi pemukiman, 198 (1,75%) di sekitar areal industri dan 165 (1,46%) ponpes tidak teridentifikasi.²⁴

Berangkat dari data tersebut pengembangan kebijakan pemerintah lebih diarahkan kepada pesantren yang dianggap punya peran strategis terhadap masyarakat pedesaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hampir mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan yang masih mengandalkan kehidupannya pada hasil pertanian. Alasan lain, bahwa kyai juga dapat mempengaruhi lembaga desa.²⁵

Secara historis, gagasan pengembangan pesantren menjadi lembaga swadaya masyarakat diawali tahun 1970-an, Departemen Agama bekerja sama dengan Departemen Pertanian merintis aktivitas agribisnis di pedesaan. Langkah ini diikuti dengan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Lembaga Pengkajian Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) lewat ketokohan M. Dawam Rahardjo yang mensosialisasikan dan mengembangkan swadaya masyarakat dengan menyelenggarakan Latihan Tenaga Pengembangan

²³ Fuad Jabali dan Jamhari (Peny.), *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta; Logos, 2002), hal. 108.

²⁴ Depag, *Op. Cit.*, hal. 27.

²⁵ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Jakarta; Mizan, 1993), hal. 257.

Masyarakat di tahun 1977.²⁶ Latihan ini diikuti peserta-peserta dari enam pondok pesantren di Jawa dan Madura. Kegiatan yang sama juga dilakukan pada tahun 1980 di ponpes Darun Najah Jakarta. Hasil pertemuan tersebut adalah telah berhasil disepakatinya konsep Tenaga Pengembangan Masyarakat. Proyek ini membina para santri untuk dilatih sebagai pioner pengembangan swadaya masyarakat di pesantren yang bersangkutan. Pesantren-pesantren yang sudah tersosialisasi dengan program ini selanjutnya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di bidang pertanian, agribisnis, koperasi serta pengembangan ekonomi melalui Badan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM).

Namun demikian, keberhasilan program pengembangan masyarakat di pesantren sangat tergantung pada persepsi kyai sebagai *top figur* pesantren. Secara garis besar ada tiga tipe kyai dalam penerimaan program pengembangan masyarakat. *Pertama*, kyai yang menerima program pengembangan masyarakat secara hati-hati. *Kedua*, kyai yang cukup hanya responsif. *Ketiga*, kyai yang bukan saja menerima tetapi bahkan langsung memikirkan implementasinya dalam pola atau sistem manajemen pesantrennya. Dua kategori kyai yang terakhir ini bisa dikatakan mempunyai wawasan yang kuat mengenai program pengembangan masyarakat, sedangkan kyai kategori pertama memerlukan pendekatan khusus, karena biasanya sulit menerima gagasan baru.²⁷

Pengalaman menunjukkan bahwa program pengembangan masyarakat akan berhasil lebih baik apabila kyai aktif menyebarkan gagasan program tersebut kepada masyarakat. Peran kyai itu tidak cukup hanya sekedar memberikan restu (*ijazah*). Akan tetapi lebih didukung keaktifan kyai dalam menyampaikan gagasan-gagasan tersebut dalam berbagai kesempatan, seperti pengajian-pengajian yang diadakan di pesantren, didukung kemampuan kyai mengontekstualisasikan pemahaman kegamaan kitab kuning yang diajarkan di pesantren. Serta adanya kesamaan gagasan para kyai dalam menangkap program pengembangan masyarakat di pesantren. Kesamaan wawasan ini merupakan titik strategis bagi proses pengembangan pesantren dan pengembangan masyarakat.

Gagasan wawasan kontekstual dan penyamaan wawasan tersebut pernah dilontarkan Kyai Sahal Mahfudz, yang didasarkan pada kenyataan bahwa kebanyakan kyai pesantren memandang ajaran agama hanyalah mementingkan ritualisme secara fiqhiiyah. Beragama seringkali diidentikkan dengan menjalankan ritus-ritus keagamaan semata. Dengan kata lain, ajaran agama hanyalah salah satu aspek kehidupan, padahal seharusnya agama mewarnai segala aspek kehidupan.²⁸ Keberhasilan mengontekstualisasikan ini akan membuat dua gagasan penting. *Pertama*, proses transformasi sosial tidak dipandang sebagai hasil atau dampak dari lingkungan eksternal pesantren, akan tetapi lebih dari itu, pesantren mempunyai andil

²⁶ Fuad Jabali dan Jamhari, *Op. Cit.*, hal. 100.

²⁷ Erfan Maryono, "Aktualisasi Peran Kemasyarakatan Pesantren: Refleksi Pengalaman LPSM," dalam *Pesantren* No. 3/Vol. V/1998, hal. 33

²⁸ Purwo Santoso, "Kiprah Pesantren dalam Transformasi: Catatan dari Maslakul Huda," dalam *Pesantren* No. 3/Vol.V/1988, hal. 81.

yang lebih besar dalam melakukan transformasi sosial kultural bagi masyarakat sekitarnya. *Kedua*, pengembangan pesantren tidak tercerabut dari akar tradisinya. Tradisi-tradisi pesantren tetap dipertahankan karena yang dibutuhkan dalam transformasi bukan penghancuran tradisi melainkan memerangi sikap tradisi yang membela *status quo*.²⁹ Kata kunci yang digunakan Kyai Sahal untuk menjelaskan strateginya dalam mengarungi arena transformasi sosial kultural adalah kanalisasi, yang secara singkat diartikan terlibat tetapi tidak hanyut. Sebagai contoh pesantren Maslakul Huda yang dipimpinnya melembagakan kegiatan pengembangan pesantren dan masyarakat tanpa harus mengubah eksistensi kepesantrenannya.

Keterlibatan pesantren dalam pengembangan masyarakat secara profesional bisa dipandang sebagai suatu bentuk terobosan. Bermula dari kerjasama beberapa tokoh dari kalangan pesantren dengan LSM, kalangan pesantren mengadopsi cara kerja LSM. Kenyataannya, di pesantren Maslakul Huda proses terobosan ini hanya menyentuh aspek esternal pesantren. Pelembagaan pesantren sebagai lembaga swadaya masyarakat ternyata tidak mengusik kegiatan pendidikan para santri. Kegiatan-kegiatan lembaga swadaya masyarakat hanya ditangani oleh para santri sebagai badal kyai yang menangani secara khusus kegiatan eksternal pesantren. Struktur organisasi pesantren ini membidangkan kegiatannya dalam dua aspek, yakni aspek eksternal (kegiatan keagamaan) dan internal (kegiatan pengembangan pesantren dan masyarakat). Masing-masing aspek ini dikelola secara berbeda. Dengan cara inilah pesantren Maslakul Huda dapat melibatkan diri dalam pengembangan swadaya masyarakat tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai lembaga keagamaan.³⁰

Pesantren Maslakul Huda yang terletak di desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah ini merealisasikan gagsannya dengan mendirikan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM). Pesantren ini merupakan salah satu dari empat belas pesantren yang ada di desa Kajen, akan tetapi mempunyai pengaruh sampai di luar desa Kajen. Awalnya pesantren ini mengirimkan utusannya mengikuti Latihan Tenaga Pengembangan Masyarakat yang diselenggarakan oleh LP3ES. Gagasan pengembangan masyarakat pedesaan disebarluaskan di kalangan para kyai di desa tersebut dan mendapat respon yang positif. Bahkan Pemerintah Daerah Dati II Pati mendukung sepenuhnya gagasan tersebut. Usaha-usaha nyata dari pesantren itu adalah penghijauan desa dengan pohon-pohon buahan, pemanfaatan pekarangan, penataan lingkungan dengan pagar, mengadakan Usaha Bersama Simpan Pinjam, Usaha Kesehatan Masyarakat dan mengenalkan program Teknologi Tepat Guna.³¹

Selain kasus tersebut, dalam pembinaan usaha di bidang ekonomi, ada pula gagasan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memperkenalkan koperasi di pesantren. Usaha koperasi di pesantren ini kebanyakan lebih digalakkan untuk mendukung keperluan sendiri. Pada awal tahun 1970-an, koperasi mulai

²⁹ *Ibid.* hal. 83.

³⁰ *Ibid.* hal. 86.

³¹ Kuntowijoyo, *Op. Cit.*, hal. 258. Bandingkan dengan Arief Mudatsir, "Kajen Desa Pesantren," dalam Dawam Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 197-218.

mendapat perhatian di kalangan santri yang dikampayekan Departemen Agama bekerjasama dengan Departemen Koperasi. Sambutan pun datang bermunculan di beberapa pesantren. Diantaranya di tahun 70-an, adalah Ponpes Darunnajah Ulujami Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Sejak koperasi itu didirikan, koperasi itu dapat bertahan sampai sekarang. Anggota koperasi itu mencapai 1.800 orang. Unit usahanya meliputi pengusahaan bahan konsumsi, seperti penyelenggaraan dapur umum, toko pelajar, kantin, kedai Pramuka, dan kafetaria. Selain itu juga unit usaha simpan pinjam. Juga ada usaha pengembangan koperasi yang dikembangkan di lingkungan pesantren. Koperasi desa yang telah dibentuk di desa oleh santri Darunnajah di antaranya koperasi simpan pinjam di desa Kalimuktı Cirebon dan koperasi nelayan di desa Gebang Ilir Babakan Cirebon yang didirikan tahun 1983.³²

Pada pengembangan teknologi tepat guna dan pengelolaan lingkungan merupakan program penting lain dari pengembangan masyarakat di pesantren. Pesantren An-Nuqayah, yang terletak di daerah sulit air di Madura telah banyak sumbangannya dalam penyediaan air. Pesantren ini telah membangun pompa hidran untuk dua desa dan pompa tali untuk tiga belas desa. Begitu juga bersama dengan masyarakat di desa Rembang yang letaknya di lereng bukit empat kilometer dari pesantren an-Nuqayah, telah berhasil mengalirkan air yang berasal dari bukit dengan pipa-pipa. Juga, di kampung lain Pekamban Daya, yang letaknya jauh dari pesantren telah berhasil mengatasi kesulitan air dengan cara yang sama. Akhirnya masalah air sudah terpenuhi oleh masyarakat desa. Pesantren ini juga telah memberikan pengetahuan teknologi tepat guna seperti mesin penetas telur, ferro semen, feber semen, atap ijuk dan tungku lorena. Keberhasilan ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa penghargaan Kalpataru kepada pesantren An-Nuqayah untuk menyelamat lingkungan. Selain pesantren ini, pesantren-pesantren besar yang ada di Jawa juga menyebarkan teknologi tepat guna kepada masyarakat. Diantranya, pesantren Maslakul Huda Kajen Pati yang mempunyai garapan 26 desa, al-Asy'ari di Jombang yang mempunyai garapan 21 desa dan Pabelan Magelang yang mempunyai garapan 18 desa. Pesantren lain yang mendapatkan penghargaan Kalpataru di masa Orde Baru sebagai penyelamat lingkungan hidup adalah PP Hidayatullah di Gunung Tambak Kecamatan Tritip Kalimantan Timur. Pesantren ini berdiri tahun 1974. Penduduk desa itu mayoritas merupakan pendatang Bugis dan Makasar. Pendiri Pesantren K. Abdulah Said lulusan Ponpes Gontor Jawa Timur. Kampanye lingkungan hidup pada saat ada pengajian-pengajian yang diadakan di pesantren dapat menyakinkan para penduduk pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Bersama-bersama penduduk mulai membangun pemukiman mereka sendiri. Rawa-rawa yang ada di sekitar desa dikelola dan dijadikan tambak ikan dan udang seluas sepuluh hektar. Juga dilakukan penyuluhan supaya hutan-hutan yang ada di sekitar desa itu tidak ditebang sesukanya. Bendungan dibuat untuk mengalirkan air ke sawah-sawah penduduk. Penduduk setempat yang melakukan pertanian berpindah-pindah diusahakan pemukiman yang tetap dan tanah pertanian. Pesantren ini juga melakukan renovasi rumah dan pesantren bersama-sama penduduk. Pesantren ini juga mempunyai kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan. Sedemikian kompleksnya kegiatan di

³² Kuntowijoyo, *Op. Cit.*, hal. 260.

pesantren sehingga pesantren ini telah mendapatkan penghargaan di bidang penyelamat lingkungan dari pemerintah di tahun 1984.³³

Banyak pesantren lain di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha untuk berperan sebagai agen pembangunan masyarakat kelas menengah ke bawah. Departemen Agama lewat EMIS (*Education Management Information System*) melakukan pendataan pesantren cermat akurat antara tahun 2000-2001 mencakup 26 propinsi. Berikut data umum pesantren yang dapat disajikan:

Tabel I: Jenis Usaha Ponpes dan partisipasi Santri di bidang Perekonomian.

No	Koperasi/ Toko	
01	Apotik	40 (0,35%)
02	Kantin	1.067 (9,43%)
03	Toko Buku	580 (5,13%)
04	Kelontog	332 (2,93%)
05	Toko Bangunan	49 (0,43%)
06	WSD	613 (5,42%)
07	BMT	202 (1,79%)
08	KSP	839 (7,42%)
09	K. Barang	772 (6,82%)
10	Jml. Santri	31.058 (1,13%)

Tabel II : Jenis Usaha Ponpes dan partisipasi santri di bidang Agribisnis.

No	Agribisnis		No	Agribisnis	
01	Buah	369 (3,26%)	10	Unggas	720 (6,36%)
02	Padi	891 (7,88%)	11	Kambing	493 (4,36%)
03	Palawija	599 (5,30%)	12	Ikan tawar	596 (5,27%)
04	Sawit	96 (0,85%)	13	Ikan laut	39 (0,34%)
05	Jamur	54 (0,48%)	14	Sapi	296 (2,62%)
06	Rempah	62 (0,55%)	15	Jangkrik	25 (0,22%)
07	Sayur	562 (4,97%)	16	Ulat	12 (0,11%)
08	Umbi	682 (6,03%)	17	Belut	48 (0,42%)
09	Pupuk	112 (0,99%)	18	Jm. Santri	30.324 (1,11%)

³³ Lihat Yaqub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa* (Bandung; Angkasa, 1983), hal. 12. Sebagaimana dikutip Kuntowijoyo, *Op. Cit.*, hal. 262.

Tabel III: Usaha Ponpes dan partisipasi Santri di bidang Industri Kecil/Kerajinan Tangan

No	Industri Kecil/Kerajinan tangan	No	Industri Kecil/Kerajinan tangan		
01	Anyaman	244 (2,16%)	08	Sapu	132 (1,17%)
02	Batik	43 (0,38%)	09	Ukiran	101 (0,89%)
03	Alat OR	68 (0,60%)	10	Tukang	628 (5,55%)
04	Konvelsi	202 (1,79%)	11	Batako	396 (3,50%)
05	Tenun	26 (0,23%)	12	Sepatu	31 (0,27%)
06	Gerabah	22 (0,19%)	13	Jml. Santri	50.952 (1,86%)
07	Makanan	440 (3,89%)			

Tabel IV: Usaha Ponpes dan Santri yang berpartisipasi di bidang Jasa

No.	J a s a	No.	J a s a		
01	Klinik	167 (1,48%)	07	Foto kopi	102 (0,90%)
02	Wartel	322 (2,85%)	08	Terjemah	80 (0,71%)
03	Cetak	145 (1,28%)	09	Elektro	145 (1,28%)
04	Sablon	330 (2,92%)	10	Las	81 (0,72%)
05	Gl. Padi	123 (1,09%)	11	Otomotif	54 (0,48%)
06	Listrik	174 (1,54%)	12	Jml. Santri	12.931 (0,47%)

Data tersebut menunjukkan bahwa pesantren dengan percaya diri mencoba keluar dari visi semula, untuk menjaga tradisi Islam sebagai *tafaqquh fiddin*, berubah dengan mencoba melangkahkan fungsinya ke arah pengembangan sumber daya pesantren dengan merespon kebutuhan masyarakat sekitarnya (*social change*). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pesantren telah mampu mengontekstualkan kitab kuning yang selama ini dikaji ke arah transformasi sosial. Walaupun jumlah pesantren itu tidak sebanding dengan jumlah pesantren di Indonesia secara keseluruhan.

P e n u t u p

Pesantren, sebagai sebuah lembaga yang muncul dan berkembang dari kultur budaya asli Indonesia, tampaknya tidak bisa dilepaskan peranannya dari akar budayanya. Fungsi pesantren yang pada awalnya hanyalah pengembangan intelektual Islam beralih fungsi menjadi pusat pengembangan masyarakat. Fenomena itu dapat mengikis anggapan sementara pengamat bahwa pesantren adalah gudang kekolotan. Berbagai fenomena yang dipaparkan patut diapresiasi sebagai sebuah potensi budaya yang perlu *diuri-uri* dan diperhitungkan sebagai potensi dan kekuatan budaya.

BIBLIOGRAFI

- Asfar, Muhammad, "Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai," dalam *Prisma* 5, Mei 1995.
- Azra, Azyumardi, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan," dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta; Paramadina, 1997.
- Burhanuddin, Jajat, "Ulama dan Politik Pembentukan Umat: Sekilas Pengalaman Sejarah Indonesia," dalam Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedlowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia*, Jakarta; Gramedia, 2003.
- Depag RI, *Pondok Pesantren*, Jakarta; Depag, 2001.
- Feillard, Andree, *NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, penerj. Lesmana, Yogyakarta; LKiS, 1999.
- Horikoshi, Hiroko, *Kyai Dan Perubahan Sosial*, Jakarta; P3M, 1987.
- Jabali, Fuad dan Jamhari (Peny.), *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*. Jakarta; Logos, 2002.
- Karim, A. Gaffar, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta; LKiS, 1995.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Jakarta; Mizan, 1993.
- Maryono, Erfan, "Aktualisasi Peran Kemasyarakatan Pesantren: Refleksi Pengalaman LPSM," dalam *Pesantren* No. 3/Vol. V/1998.
- Mas'ud, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta; LP3ES, 1989.
- Mudatsir, Arief, "Kajen Desa Pesantren," dalam Dawam Rahardjo (edt.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*, Jakarta; P3M, 1985.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah", dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)*, Depag RI; Ditjen Binbaga Islam, 1998.
- Rahardjo, Dawam, "Kyai dalam Perubahan Sosial," dalam *Pesantren*, No. 4/ Vol. II/1985.
- Santoso, Purwo, "Kiprah Pesantren dalam Transformasi: Catatan dari Maslakul Huda," dalam *Pesantren* No. 3/Vol.V/1988.
- Surabaya Post*, 20-29 Mei 1992.
- Tebba, Sudirman, "Dilema Pesantren: Belenggu Politik dan Pembaruan Sosial," dalam Dawam Rahardjo (edt.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*, Jakarta; P3M, 1985.
- Tempo*, 21 September 1991 dan 30 Mei 1992
- Yaqub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung; Angkasa, 1983.
- Zaini, Wahid, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta; LPSM NU DIY, 1995.

Ahmad Ali Riyadi, M.Ag Peserta Program Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekarang menjadi dosen luar biasa pada STAIN Kudus.

